

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI KALURAHAN PURWOMARTANI
KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Di Susun Oleh :

**NELSON RINGU LANGO
16520147**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2023

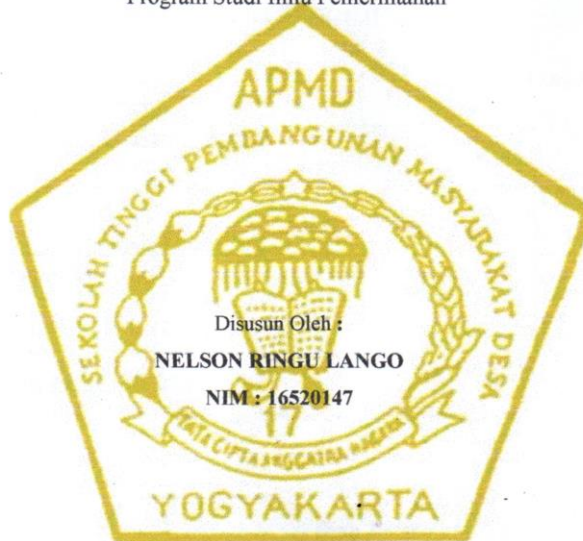
SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI
KALURAHAN PURWOMARTANI KAPANEWON KALASAN
KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023

i




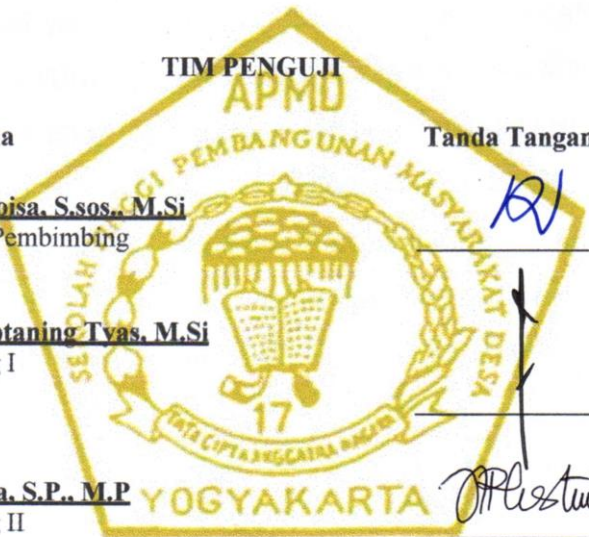
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 juni 2023
Jam : 11:30
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Dr. Riel Samaloisa, S.sos., M.Si</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Penguji Samping II	



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Riel Samaloisa, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nelson Ringu Lango

Nim : 16520147

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI MASYARAKAT MISKIN DIKALURAHAN PURWOMARTANI KAPANEON KALASAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Nelson Ringu Lango

NIM : 16520147

MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!” Roma 12:12

“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.” Yakobus 1:12

"Jangan takut bertemu kegagalan karena keberhasilan menunggumu di masa depan."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil tulisan berupa skripsi ini, penulis penulis persembahkan yang pertama kepada Bapak Sairo Djaga, S.Pd dan Ibu Tuwa Ringu yang memberikan segalanya untuk kehidupan penulis. Termasuk dalam memfasilitasi, memotivasi dan mendukung penulis dalam menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Restu beserta doa yang dipanjatkannya membuat penulis menerima kemudahan dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Selain itu, beliau telah bekerja tanpa lelah untuk membesarkan penulis sehingga penulis bisa tegak berdiri hingga saat ini.

Kedua, untuk Kakak dan Adik saya, semoga penulisan skripsi ini menjadi pemacu dan motivasi mereka dalam bekerja dan berusaha dalam membangun kehidupan mereka. serta ketiga untuk keluarga besar kami. Skripsi ini menjadi sebuah langkah awal bagi penulis untuk bangkit dan berusaha dalam menjalani proses kehidupan ke depan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih sayang dan karunia-Nya sehingga proses penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi BBM Bagi Masyarakat Miskin di Kalurahan Purwomartani Kapaneon Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dapat berjalan sebagaimana mestinya. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si yang telah memberikan ijin penelitian sehingga penulis bisa diterima saat terjun di lapangan.
2. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam setiap tahapan skripsi yang dilalui.
3. Kepada semua dosen mata kuliah yang pernah saya tempuh selama proses belajar yang telah memberikan ilmu dan manfaat besar bagi kehidupan saya selama masa studi.
4. Kepada teman-teman di masa kuliah yang selalu bersama-sama dalam menjalankan studi pada masa kuliah.
5. Kepada teman kos-kos Putra Anawuttu yang bersama suka dan duka dalam proses penulisan skripsi ini.

INTISARI

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Masyarakat Miskin di Kalurahan Purwomartani Kapaneon Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Skripsi ini adalah penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak terhadap masyarakat Kalurahan Purwomartani. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah implementasi penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai sehingga berdampak terhadap kesejahteraan mereka. Dengan dinaikkannya subsidi BBM maka Pemerintah mengalihkan dari subsidi BBM ke BLT BBM untuk mengurangi beban masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan BBM serta untuk membentuk SDM yang berkualitas. Program Bantuan Langsung Tunai dimaksudkan untuk membantu rakyat miskin, khususnya bagi mereka yang kondisi perekonomiannya masih lemah dan masih memprihatinkan, agar mampu memberikan bantuan seperti, bahan sembako. Bagi pemerintah program Bantuan Langsung Tunai BBM merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam rangka membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin di tengah kesulitan ekonominya. Bantuan Langsung Tunai BBM merupakan salah satu bentuk program bantuan sosial yang berupa tunjangan uang yang umumnya diberikan kepada masyarakat yang termasuk dalam kriteria penerima manfaat. Jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, pendekatan terhadap permasalahan implementasi BLT BBM. subjek penelitian ditentukan berdasarkan kepengurusan yang terkait dengan permasalahan implementasi kebijakan BLT BBM dan pengumpulan data menggunakan

n metode wawancara, observasi dan Dokumentasi. Analisis menggunakan kualitatif agar data yang diperoleh dapat didiskripsikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi program yang dilakukan oleh pemerintah berupa program bantuan langsung tunai di Kalurahan Purwomartani dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Disposisi/sikap masyarakat sangat antusias dan mendukung adanya program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) ini karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan dengan adanya program ini angka kemiskinan di Kalurahan Purwomartani akan berkurang. Sumber Daya terdiri dari Sumber daya manusia dan dari segi Sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk pengimplementasian program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) ini. Struktur Birokrasi terkait dengan SOP implementasi program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) sudah terstruktur dengan baik dan fragmentasi pemerintah desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidangnya.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Bantuan Langsung Tunai(BLT), Subsidi Bahan Bakar Minyak(BBM).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Konseptual	8
1. Perspektif Governing.....	9
2. Implementasi	11
3. Kebijakan.....	13
4. Bantuan Langsung Tunai.....	15
G. Kerangka Pikir.....	16
H. Metode Penelitian	17
BAB II PROFIL KALURAHAN PURWOMARTANI, KAPANEWON	21
KALASAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA	
YOGYAKARTA	21
A. Sejarah Desa Purwomartani.....	21
B. Visi Dan Misi Kalurahan Purwomartani.....	22

C. Letak Geografis Dan Administratif	23
D. Komposisi Penduduk Kalurahan.....	24
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	25
3. Jumlah Penduduk Angka Kemiskinan.....	26
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Masyarakat Miskin	28
B. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BBM).....	39
1. Komunikasi.....	39
2. Disposisi	42
3. Sumber Daya	44
4. Struktur Birokrasi	46
C. Dampak Bantuan Langsung Tunai BBM Terhadap Masyarakat di Kalurahan Purwomartani.....	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Masyarakat Miskin Kalurahan Purwomartani.....	3
Table 2 Nama Informan	20
Table 3 Daftar Kepala Desa Kalurahan Purwomartani.....	22
Table 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	24
Table 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	25
Table 6 Jumlah Penduduk Angka Kemiskinan	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	17
Gambar 2 Peta Kalurahan Purwomartani.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Penetapan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pertama, dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat melalui pengalihan subsidi BBM yang tepat sasaran dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai dan Bansos, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga jual eceran bahan bakar minyak jenis tertentu dan harga jual eceran bahan bakar minyak penugasan khusus.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Ketentuan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Ketentuan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Diktum kesatu, harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan:

1. Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Minyak solar (gas oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Diktum kedua menyebutkan, harga jual eceran untuk jenis Bahan Bakar Minyak yang dikhususkan untuk jenis bensin RON 90 di tempat penyerahan, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan TONG. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Diktum ketiga, harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk penugasan.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan pada September 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022, merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia mengatasi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) guna melindungi daya beli masyarakat kurang mampu. akibat tekanan berbagai kenaikan harga global. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin sebagai akibat dari pencabutan subsidi BBM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengakibatkan minyak bumi dikembalikan ke harga pasar, sehingga untuk meningkatkan daya beli konsumen pemerintah memberikan subsidi langsung kepada masyarakat. miskin. BLT merupakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM, dana ini dikeluarkan secara bertahap oleh pemerintah kepada masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan fenomena global, dimana kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Mendengar kata kemiskinan, sudah pasti seseorang dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan kata lain orang tersebut hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki harta lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman pada Maret 2021, garis kemiskinan di Kabupaten Sleman mencapai Rp422.933 per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman mencapai 108,93 ribu orang (8,64%), naik sebesar 9,16 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada maret 2020 yang sebesar 99,78 ribu orang (8,12%) atau terjadi kenaikan 0,52 % poin dalam kurun waktu satu tahun terakhir khususnya di Kalurahan Purwomartani.

Table 1 Jumlah Masyarakat Miskin Kalurahan Purwomartani

No	Tahun	Miskin (jiwa)	Rentan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	2018	2.075	3.266	5.341
2	2019	1.792	3.318	5.110
3	2020	1.960	3.548	5.508
4	2021	2.136	4.315	6.451
5	2022	2.177	5.492	7.669

Sumber: Profil Kalurahan Purwomartani

Berdasarkan tabel di atas kemiskinan di Kalurahan Purwomartani mencapai angka 7669 jiwa dari total 37.173 jiwa. Pertumbuhan angka kemiskinan di Kalurahan Purwomartani terus mengalami kenaikan dalam kurun

waktu 3 tahun terakhir. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai macam program bantuan sosial salah satunya program bantuan langsung tunai BBM.

Penyaluran dana BLT berdasarkan data masyarakat miskin yang disampaikan BPS kepada Kementerian Sosial (Depsos), kemudian Kementerian Sosial menyampaikan data tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diverifikasi lebih lanjut oleh Gubernur dan perangkatnya. Kupon yang diberikan kepada masyarakat penerima untuk digunakan dalam pengambilan BLT di setiap periode. Setiap bulan masyarakat penerima santunan diberikan subsidi sebesar Rp150.000 yang dibayarkan selama empat bulan, dalam setahun dalam 4 tahap setiap tahap diberikan Rp150.000 (untuk empat bulan) setahun Rp 600.000, terbagi dalam 4 tahap.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sulisman, 2020) dengan judul implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Secara Merata Kepada Masyarakat menemukan adanya masalah dalam proses implementasi dana BLT di Desa Gampong Meudang Ara. Masalah tersebut adalah timbulnya kecemburuan sosial di antara masyarakat, dimana konflik sosial tersebut terjadi antara masyarakat yang tidak berhak menerima dana BLT serta masyarakat yang berhak menerima dana BLT dengan pemimpin desa. Masyarakat miskin di Desa Ganpong Meudang Ara tidak setuju dengan implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dengan membagi merata bantuan langsung tunai tersebut kepada seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana

implementasi dana desa di Desa Gampong Meudang Ara belum terimplementasi dengan baik akibat adanya konflik sosial tersebut.

Pelaksanaan kebijakan penyaluran dana BLT sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM menimbulkan konflik di masyarakat, karena ketepatan dalam penyaluran BLT masih kurang tepat. Ada kecemburuan dan kecurigaan warga karena lemahnya proses seleksi penerima BLT. Pada dasarnya BLT adalah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yaitu masyarakat miskin menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).(Amran, 2022)

Penelitian lainnya yang menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan program BLT adalah penelitian yang dilakukan oleh (Musdalifah & R, 2022) dengan judul “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pewisoa Jaya Kabupaten Kolaka”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pesiwoa Jaya belum berjalan dengan baik. Hal itu terjadi karena penetapan nama KK sebagai penerima BLT tidak tepat sasaran karena pemerintah desa tidak melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan, meski mendatangi rumah-rumah warga untuk mendata penerima BLT. Pencapaian tujuan kebijakan program di Desa Pewisoa Jaya belum berjalan maksimal, karena masih ada masyarakat yang dikategorikan mampu dan pernah mendapatkan bantuan sosial lainnya namun namanya terdaftar kembali sebagai penerima BLT-DD, sementara masih ada masih banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh bansos. Sehingga tujuan program BLT-DD belum sepenuhnya tepat sasaran.

Penyaluran dana BLT BBM di Kabupaten Sleman pada tahap pertama di bulan Oktober tahun 2022 telah tersalurkan sebanyak 89.151 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total 90.908 KPM yang terdata oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Terjadi gagal salur sebanyak 1.757 KPM. Kegagalan penyaluran dana BLT BBM ini dikarenakan tidak akuratnya data yang diberikan oleh BPS Sleman kepada Dinas Sosial Kabupaten Sleman mengenai masyarakat yang layak menerima Program BLT BBM. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman tidak melakukan pendataan yang akurat terhadap masyarakat yang sudah meninggal, berdomisili di luar Sleman, dan mendapatkan bantuan ganda dengan BLT Dana Desa, serta adanya masyarakat mampu yang didata sebagai warga tidak mampu.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya berdampak bagi masyarakat miskin. Namun berdampak juga bagi para driver ojek online. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ini mengakibatkan protes yang dilakukan oleh ribuan driver ojol di Yogyakarta. Ribuan driver ojol yang tergabung dalam forum ojol yogyakarta melakukan aksi protes didepan gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta. Driver ojol meminta agar harga BBM diturunkan. Karena kenaikan dari BBM 30 persen, sedangkan kenaikan aplikator hanya 15 persen. Yang mengakibatkan driver ojol harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bisa menyelesaikan tugas sebagai driver. Selain itu, berdampak langsung juga bagi perekonomian sehari-hari pengemudi ojek online. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari tidak cukup dengan penghasilan yang didapatkan setelah pemerintah menerapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan pemaparan permasalahan latar belakang di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bbm Bagi Masyarakat Miskin di Kalurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM Bagi Masyarakat Miskin di Kalurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori George Edward III yaitu :

1. Komunikasi dalam Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) di Kalurahan Purwomartani
2. Disposisi atau sikap dalam Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) di Kalurahan purwomartani
3. Sumber daya dalam Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) di Kalurahan purwomartani
4. Struktur Birokrasi dalam Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) di Kalurahan Purwomartani.

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi BBM bagi masyarakat miskin di Kalurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terhadap implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
2. Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi pemerintah selaku pembuat program Bantuan Langsung Tunai BBM. Bagaimana Program BLT-BBM dapat berdampak terhadap masalah mengatasi daya beli dan tingkat kemiskinan masyarakat.
3. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

F. Kerangka Konseptual

1. Perspektif Governing

Menurut (Eko.S, 2021) Tindakan pemerintah disebut Governing (G2). G2 merupakan konsep yang perlu dibedakan dengan konsep penguasa, meskipun banyak ahli sering menyamakannya. Literatur yang membedakan ditulis oleh Steven A. Cook (2007) *ruling but not governing* (menguasai tetapi tidak memerintah). Literatur tersebut membahas bagaimana militer mendominasi politik, atau dapat dikatakan bahwa kekuasaan dapat menguasai semua garis atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (*governing*). Dalam hal ini putusan juga dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang tidak menjadi suatu pemerintahan, dalam arti tidak mengatur atau mengurus. Ada juga beberapa literatur yang menganggap bahwa ada perbedaan antara memerintah dan memerintah, dimana memerintah itu sendiri dapat dilakukan oleh siapa saja dan memerintah memiliki arti mendominasi dan memiliki unsur dominasi. Dalam cita-cita normatif, pemerintahan melekat pada pemerintah dan memiliki kewenangan yang menjadi legitimasi untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dalam arti dasar memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah.

Pemerintahan didefinisikan sebagai kata kerja yang memerintah, di mana kata mengatur tidak umum digunakan dalam kosakata pemerintahan. Kata yang umum digunakan dalam pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan, karena penyelenggaraan pemerintahan berarti ada kewenangan untuk mengatur dan mengurus. Kewenangan ini merupakan

tradisi atau pengaruh yang sangat kuat dari Belanda yang berarti mengatur dan mengatur, dimana tindakan hukum dan administrasi mengabaikan tindakan politik. Pemerintahan memiliki banyak padanan kata sehingga sulit untuk dipahami, tetapi dalam pengertian bahasa Indonesia kata baku untuk memerintah adalah mengatur dan mengatur. Padanan kata mengatur dalam ilmu pengetahuan perlu dilakukan perbandingan, yaitu perlu diperbandingkan dengan konsep-konsep kunci yang harus diadaptasi, misalnya: konsep memerintah (*mastering*), konsep memerintah (mengatur dan mengatur), konsep pemesanan (pengorganisasian atau penciptaan) dan konsep pengarahan (*directing*).

Ilmuwan politik lebih suka memerintah daripada memerintah, misalnya ilmuwan Amerika Serikat seperti Robert Dahl. Dahl sebagai ilmuwan politik tetapi kajiannya lebih dekat dengan politik dalam arti pemerintahan, yang pada tahun 1961 menulis "*Who Govern*" atau yang memerintah. Dahl berbicara mengenai otoritas politik atau kewenangan yang telah dilembagakan dalam lembaga pemerintahan. William Domhoff (1967) lebih menyukai konsep rule yang dalam bukunya tertulis "*Who Rule*" atau siapa yang mengontrol. Dia memiliki perspektif di luar lembaga pemerintah, tetapi perlu dicatat bahwa ada kekuatan di luar lembaga pemerintah yang sebenarnya berkuasa.

Konsep memerintah yang dipahami sebagai upaya mengatur dan mengatur harus memiliki proses, fungsi dan hasil. Pemerintahan

mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Pembentukan undang-undang dan kebijakan merupakan tindakan penting pemerintah dalam pemerintahan. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, perlindungan, dan pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah atas negara, warga negara, dan masyarakat.

Tindakan memerintah oleh pemerintah mengandung nilai dan tujuan. Ilmu politik berbicara banyak tentang legitimasi. Hukum berbicara tentang legalitas. Ekonomi berbicara tentang efisiensi. Administrasi publik berbicara tentang efektivitas. Ini adalah nilai dan tujuan yang dimiliki setiap disiplin ilmu. IP tentunya harus berbeda dengan ilmu-ilmu tersebut. Walaupun pada akhirnya tindakan pemerintah harus efektif, namun efektivitas bukan sekedar bersifat manajerial dan tidak datang secara tiba-tiba, sehingga saya mengusulkan konsep governance untuk mencirikan nilai-nilai, tujuan dan identitas IP.

2. Implementasi

Implementasi menurut kamus Webster dalam Wahab (2012:135) merumuskan bahwa istilah *to implement* (melaksanakan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); untuk memberikan efek praktis untuk (menyebabkan dampak/efek pada sesuatu). Dari perspektif ini, implementasi didefinisikan sebagai proses penegakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan yudisial, perintah eksekutif atau keputusan presiden.

Menurut (Maulidya, 2020) Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun pejabat, pemerintah maupun swasta untuk mencapai keinginan serta tujuan-tujuan yang diatur dalam suatu kebijakan. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang seperti pemerintah ataupun swasta dimana sebagai alat untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan atau diatur dalam keputusan kebijakan Implementasi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tindakan yang harus diambil. Karena pada dasarnya setiap perencanaan memiliki tujuan yang perlu dicapai.

Model teori yang dikembangkan oleh George Edward III (Winarno:175-203) dalam (Maulidya, 2020) mengenai implementasi kebijakan ada 4 variabel:

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan/program akan dapat diimplementasikan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakteristik yang perlu dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

- d. Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menggunakan teori yang relevan terhadap implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai bbm yaitu teori yang ditegaskan oleh George Edward III. Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam penelitian ini akan diukur menggunakan 4 indikator implementasi oleh George Edward III yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi, sehingga peneliti dapat melihat dan menjabarkan bagaimana pengaruh implementasi program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) terhadap masyarakat miskin di Kalurahan Purwomartani.

3. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan seperangkat konsep dan asas yang menjadi pedoman dan landasan perencanaan dalam pelaksanaan tugas, kepemimpinan dan tindakan. Istilah ini dapat diterapkan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk pemerintah, organisasi sektor swasta, dan kelompok. Kebijakan berbeda dengan aturan dan hukum. Jika undang-undang dapat menegakkan atau melarang tindakan (misalnya, undang-undang yang mewajibkan

pembayaran pajak penghasilan), kebijakan tersebut hanya menentukan tindakan yang paling mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan.

Kebijakan adalah pernyataan lisan atau tertulis yang memberikan petunjuk umum mengenai penetapan satu batas pembatas dan petunjuk umum untuk pergerakan. Secara etimologis, “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan juga dapat berarti seperangkat konsep dan prinsip yang membentuk garis-garis pelaksanaan tugas, kepemimpinan, dan tindakan. Kebijakan dapat berupa keputusan yang dipertimbangkan dengan hati-hati oleh para pembuat keputusan puncak, dan bukan kegiatan yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan pengambilan keputusan.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005:13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.

- e. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

4. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung dalam bentuk jumlah tertentu kepada rumah tangga sasaran (RTS) yaitu rumah tangga miskin. Program ini dibiayai oleh pemerintah sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan penyesuaian kompensasi pemotongan subsidi BBM. Tujuan program BLT untuk RTS adalah :

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi;
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Bantuan tunai tanpa syarat dari pemerintah pada tahun 2022 akan membantu masyarakat miskin agar tidak terlalu merasakan dampak kenaikan harga BBM. Hal mendasar dari kebijakan program BLT ini adalah

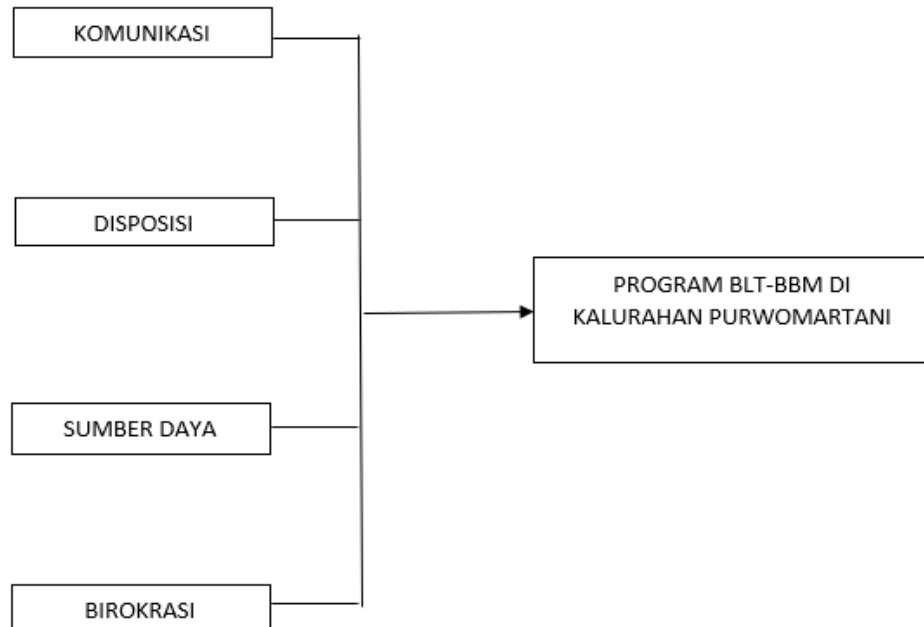
untuk membantu masyarakat miskin atau kelompok masyarakat kedua (Bambang Heru) yang tentunya akan merasakan dampak kenaikan harga BBM.

Selain itu, BLT dilaksanakan sebagai kompensasi pemotongan subsidi BBM bagi masyarakat miskin. Pemerintah menilai tidak akan ada lagi subsidi BBM pada tahun 2022 yang akan menambah total APBN dan akan terjadi defisit pada kas negara. Oleh karena itu, BLT ini dicanangkan sebagai santunan bagi masyarakat miskin. Ukuran keberhasilan yang digunakan pemerintah sebagai pertimbangan harus mampu mengubah taraf hidup masyarakat itu sendiri.

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka konseptual yang dipaparkan maka kerangka pikir yang dibangun adalah implementasi program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) terhadap masyarakat miskin. Bagaimana kita melihat efektifitasnya implementasi program BLT BBM ini terhadap masyarakat yang tepat sasaran atau dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Kerangka pikir yang dibangun dalam penelitian ini berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Dimana dalam mengukur implementasi menggunakan empat indikator yaitu komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi. Peneliti melihat bagaimana teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh bagi implementasi program BLT-BBM di kalurahan Purwomartani. Lebih lengkap lagi dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 1 Kerangka Pikir



H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagai metode penulisan kajian. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menggali informasi secara dalam dan terbuka dalam berbagai tanggapan. Penelitian ini membuat orang untuk mengeluarkan pemikiran mereka terhadap suatu permasalahan. Berdasarkan pemahaman tersebut, studi kasus dipilih sebagai metode kajian karena mempunyai kelebihan dalam memberikan penjelasan suatu topik atau fenomena dengan lebih mendalam. Selain itu metode studi kasus juga mempunyai keunggulan dalam menghasilkan pengetahuan (teori) yang relevan melalui pemaparan yang dilakukan secara komprehensif.

Singkatnya, penelitian dengan metode studi kasus berusaha mengungkap masalah yang begitu banyak (kompleks) dengan teknik observasi, pengumpulan data wawancara dan diskusi guna membangun suatu kerangka pikir (pengetahuan).

Data primer dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara dan diskusi mendalam terhadap sebelas orang (11) orang yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Teknik wawancara dan diskusi mendalam yang dilakukan oleh peneliti kali ini adalah wawancara semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur karena memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, individu yang menerima pertanyaan bisa diminta untuk mengeluarkan pendapat dan idenya. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan secara bergantian, dimulai dari pemerintah desa yaitu Lurah Purwomartani pada tanggal 27 Januari 2023 di kantor Lurah Purwomartani. Pokok pertanyaan penulis terhadap Lurah Purwomartani H. Semiono ialah tentang pendataan penduduk yang layak mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai BBM dan bagaimana proses implementasi program tersebut. Kemudian narasumber lainnya juga yang dilakukan wawancara di hari yang sama yaitu tanggal 27 Januari 2023 adalah perangkat desa yang melaksanakan kegiatan teknis program bantuan langsung tunai di Kalurahan Purwomartani. Untuk masyarakat, kebanyakan wawancara dilakukan di rumah informan bernama Sukiman, Supardi, Marwoto, Kasmiyatu, Sri Purwaningsih, dan Sadrali. Peneliti menanyakan hal yang sama terhadap masyarakat yang

menjadi sumber wawancara yaitu seputar dampak dari implementasi program Bantuan Langsung Tunai BBM.

Peneliti akan menggunakan dokumentasi berupa tulisan dan gambar sebagai salah satu bukti dalam mencari data dan fakta untuk menambah data sekunder. Dalam kajian ini peneliti mendapatkan dokumentasi sebagai data sekunder berupa profil Kalurahan Purwomartani, papan struktur Pemerintah Kalurahan Purwomartani dan dokumen-dokumen lainnya. Profil kalurahan didapatkan melalui web *purwomartanisid.slemankab.go.id*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian berisi tahapan-tahapan mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Hal *Pertama*, yang dilakukan ialah *collection data* (pengumpulan data). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. *Kedua*, *reduction data* (reduksi data) dipakai guna menajamkan, menggabungkan, mengorganisasikan dan membuang data yang tidak penting sehingga memudahkan peneliti menganalisis hasil pembahasan. *Ketiga*, *display data* (penyajian data). Kegiatan ini memberikan petunjuk penulis untuk menyajikan gabungan data yang diperlukan sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan dengan singkat dan benar. Sajian data kualitatif ini berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan ditambah beberapa bagan. Dengan demikian, pada kajian ini data disajikan dengan sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Terakhir, peneliti

melakukan penarikan kesimpulan dari kajian yang dilakukan (*conclusion drawing*).

Penelitian ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi hambatan pasti ditemui. Hambatan yang paling dirasakan ialah kesulitan dalam menemukan data primer melalui wawancara. Mayoritas warga masyarakat sulit ditemui peneliti dan tidak berkenan dijadikan narasumber dengan berbagai alasan. Hambatan hadir adalah padatnya aktivitas sehari-hari di luar rumah seperti bekerja mencari nafkah yang dilakukan oleh narasumber. Sehingga, pertemuan untuk wawancara beberapa kali harus ditunda dan. Penulis memuat daftar informan wawancara dalam bentuk tabel di bawah ini. Tujuan dimuatnya tabel tersebut untuk memaparkan lebih rinci mengenai informan yang ditunjuk dalam penelitian ini.

Table 2 Nama Informan

No	Nama	Pekerjaan
1	H.Semiono	Lurah
2	Dwi Antoro	Kasih Pelayanan
3	Sepi Budi Hartono	Kepala Dukuh
4	Sukiman	Masyarakat
5	Sartono	Bpkal
6	Supandri	Masyarakat
7	Bravo Bi'tsa Nilal. I	Pangripta
8	Marwoto	Masyarakat
9	Kasmiyatu	Masyarakat
10	Sri Purwaningsih	Masyarakat
11	Sadralli	Masyarakat

Sumber : Sistem Informasi Desa (SID) Kelurahan Purwomartani

BAB II

**PROFIL KALURAHAN PURWOMARTANI, KAPANEWON
KALASAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

A. Sejarah Desa Purwomartani

Sejarah pembentukan wilayah dan administrasi Desa Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman didasarkan pada pengumuman Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 tentang peraturan resmi yang diundangkan berdasarkan Surat Pemberitahuan nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan kawasan kelurahan.

Desa Purwomartani merupakan penggabungan dari empat desa tua, yaitu Desa Lama Babadan, Desa Kujonsari Lama, Desa Temanggal Lama dan Desa Kadirojo Tua. Sejarah pemberian nama Desa Purwomartani berawal dari penggabungan Desa lama dan sekaligus dimaksudkan untuk melestarikan kawasan hutan di daerah tersebut yaitu dengan nama Wono Martani yang rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pada tahun 1949 pada saat penggabungan wilayah kelurahan, wilayah tersebut bernama Purwomartani, kebetulan Desa Purwomartani dalam urutan kode wilayah Kapanewon Kalasan memiliki nomor urut pertama.

Para Kepala Desa/Lurah yang pernah memimpin Kalurahan Purwomartani hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Table 3 Daftar Kepala Desa Kalurahan Purwomartani

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	Poerwodihardjo	1949 – 1965	Lurah Pertama
2	Hardjo Martojo	1965 – 1987	Lurah Kedua
3	Soewardi AD	1987 – 1998	Kepala Desa
4	Asmawi Nugroho,SIP	1998 – 2013	Kepala Desa
5	H.Tugiran BA	2014 – 2017	Kepala Desa
6	H. Semiono	2017 – 2019	Kepala Desa
7.	H. Semiono	2020-Sekarang	Lurah

Sumber : <https://purwomartanisid.slemankab.go.id/first/artikel/68>

Tabel di atas menunjukkan bahwa periode dari setiap Lurah Desa yang berada di Kalurahan Purwomartani. Dalam artian bahwa perkembangan masing- masing periode dari kepala Kalurahan, terus mengalami peningkatan.

B. Visi Dan Misi Kalurahan Purwomartani

Visi :

Menuju Purwomartani aman, temtram, pintar, agamis dan berbudaya.

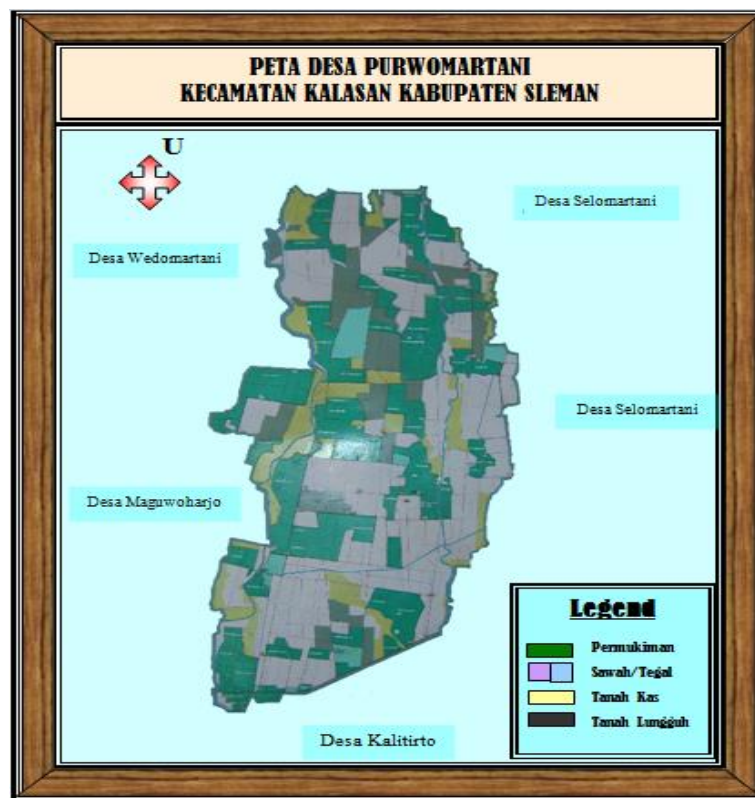
Misi :

1. Menjadikan pemerintah kalurahan yang tanggap dan aspiratif
2. Menciptakan kondisi yang aman, bersih, tertib dan toleran
3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat
4. Memberdayakan potensi kalurahan yang ada di masyarakat/
memberdayakan potensi sumberdaya manusia dan ekonomi kerakyatan
5. Mengembangkan dan meningkatkan potensi Badan usaha Milik Kalurahan (BUMKal) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

C. Letak Geografis Dan Administratif

Luas wilayah Kalurahan Purwomartani adalah 1.205 Ha. Yang terdiri dari tanah persawahan, tanah permukiman, tanah hutan dan tanah perkebunan. Keadaan umum wilayah Kalurahan Purwomartani berada di wilayah Kecamatan Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman dengan keadaan sebagai berikut: Sebelah Utara Kal. Selomartani Kapanewon Kalasan, Sebelah Selatan Kal. Tegaltirto dan Kalitirto Kapanewon Berbah, Sebelah Barat Kal. Maguwoharjo Kapanewon Depok dan Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak dan Sebelah Timur Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan.

Gambar 2 Peta Kalurahan Purwomartani



Sumber: Sistem Informasi Desa (SID) Kelurahan Purwomartani

Berdasarkan batas wilayah di atas warna hijau untuk pemukiman, warna ungu dan biru muda untuk sawah atau tegal, warna kuning untuk tanah kas, warna hitam untuk tanah lungguh dan dapat disimpulkan bahwa kelurahan Purwomartani berada tepat di tengah-tengah empat desa tersebut, Kelurahan Purwomartani menjadi sentral pembangunan dan akses beberapa desa yang ada di wilayah tersebut.

D. Komposisi Penduduk Kelurahan

Demografi merupakan sebuah visual yang menunjukkan kondisi kependudukan yang ada di sebuah wilayah tertentu, saat ini yang dibahas adalah Kelurahan Purwomartani. Guna menentukan perencanaan dan mengkaji fenomena permasalahan maka dibutuhkan visualisasi demografi. Kemudian visualisasi demografi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan demi mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Jumlah penduduk menjadi salah satu aspek yang menjadi acuan dalam proses perencanaan. Total keseluruhan penduduk Purwomartani ada 37.173 jiwa terbagi dalam 12.397 KK.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Table 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelompok	Jumlah
1	Laki-laki	19.420 jiwa
2	Perempuan	19.026 jiwa
	Total	38.446 jiwa

Sumber: Sistem Informasi Desa (SID) Kelurahan Purwomartani

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari jenis kelamin penduduk, didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki, dengan jumlah 18686 jiwa. Terdapat selisih 338 jiwa dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 18348 jiwa.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Table 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok	Jumlah (jiwa)
1	Di bawah 1 Tahun	16
2	2 s/d 4 Tahun	142
3	5 s/d 9 Tahun	2066
4	10 s/d 14 Tah	2754
5	15 s/d 19 Tahun	2905
6	20 s/d 24 Tahun	2970
7	25 s/d 29 Tahun	2826
8	30 s/d 34 Tahun	2627
9	35 s/d 39 Tahun	2647
10	40 s/d 44 Tahun	3257
11	45 s/d 49 Tahun	3201
12	50 s/d 54 Tahun	2942
13	55 s/d 59 Tahun	2567
14	60 s/d 64 Tahun	2126
15	65 s/d 69 Tahun	1541
16	70 s/d 74 Tahun	1079
17	Diatas 75 Tahun	2780
	TOTAL	38.446

Sumber : Sistem Informasi Desa (SID) Kelurahan Purwomartani

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk di Kalurahan Purwomartani. Jika dilihat menurut kelompok usia dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk didominasi oleh masyarakat yang berusia 40-44 tahun yaitu sebanyak 3253 Jiwa. Di urutan kedua ditempati oleh masyarakat dengan usia 45-49 tahun dengan jumlah 3213 jiwa. Terakhir sebanyak 2935 jiwa merupakan masyarakat dengan usia lanjut atau 50-54 tahun.

3. Jumlah Penduduk Angka Kemiskinan

Table 6 Jumlah Penduduk Angka Kemiskinan

No	Tahun	Miskin (jiwa)	Rentan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	2018	2.075	3.266	5.341
2	2019	1.792	3.318	5.110
3	2020	1.960	3.548	5.508
4	2021	2.136	4.315	6.451
5	2022	2.177	5.492	7.669

Sumber : Sistem Informasi Desa (SID) Kelurahan Purwomartani

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2022 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Dalam waktu tiga tahun tersebut di Kalurahan Purwomartani jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 2.559 jiwa. Setiap tahunnya terjadi pertumbuhan jumlah masyarakat miskin di Kalurahan Purwomartani. Dengan data masyarakat miskin tersebut, maka program pemerintah yang berupa bantuan langsung

tunai harus diimplementasi sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang ada sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Kalurahan Purwomartani.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) di Kalurahan Purwomartani, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi program yang dilakukan oleh pemerintah berupa program bantuan langsung tunai di Kalurahan Purwomartani dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif karena program ini telah berhasil berjalan sekian tahunnya dan bisa membantu masyarakat miskin.
2. Disposisi/sikap masyarakat sangat antusias dan mendukung adanya program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) ini karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan dengan adanya program ini angka kemiskinan di Kalurahan Purwomartani akan berkurang.
3. Sumber Daya terdiri dari Sumber daya manusia dengan jumlah masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai sebanyak 189 KPM. Yang tersebar di 21 padukuhan dari segi Sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk pengimplementasian program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) ini.

4. Struktur Birokrasi terkait dengan SOP implementasi program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) sudah terstruktur dengan baik dan fragmentasi pemerintah desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidangnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan berupa :

1. Komunikasi

Pemerintah Kalurahan Purwomartani harus mempertahankan cara penyampaian informasi yang sudah dilakukan pada setiap implementasi kebijakan program bantuan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan agar pemerintah memberikan kejelasan informasi yang pasti mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak agar dalam implementasi komunikasinya tidak terjadi konflik sosial di masyarakat. Kejelasan informasi dalam komunikasi ini penting ditinjau kembali oleh pemerintah kalurahan Purwomartani.

2. Disposisi

Peneliti memberikan saran agar antusias semua golongan dalam menjalankan kebijakan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di Kalurahan Purwomartani terus ditanamkan dan dipertahankan untuk di setiap program bantuan yang akan datang. Keantusiasan dan tanggung jawab dari semua perangkat desa bahkan masyarakat menjadi

kunci dari implementasi program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang berjalan baik di Kelurahan Purwomartani.

3. Sumberdaya

Peneliti memberikan saran agar pihak Kelurahan Purwomartani meninjau kembali setiap tugas yang diberikan kepada setiap perangkat desa sebagai penanggung jawab program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak. Dengan cara membagi tugas dan tanggung jawab di setiap wilayah padukuhan ditanggungjawabkan lebih dari satu orang sehingga proses implementasi program kebijakan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dapat terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Dari struktur birokrasi, peneliti memberi saran berupa memanfaatkan setiap kualitas perangkat desa yang ada sesuai dengan kemampuan dan kapasitas perangkat desa yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D. (2021). *Implementasi Kebijakan Blt-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng*. 13(2), 97–113.
- Amran, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Secara Merata Kepada Masyarakat. *Jurnal Transparansi Publik (Jtp)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.29103/Jtp.V2i1.7715>
- Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47431/Governabilitas.V2i1.109>
- Hasanah, U., & Putri, Y. F. (2021). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Desa Prajekan Lor Kabupaten Bondowoso. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 5(2), 219. https://doi.org/10.36841/Cermin_Unars.V5i2.1338
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Sebaran Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 79–91. <https://doi.org/10.29244/Jai.2019.7.2.79-91>
- Mastana, I. W. (N.D.). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung*. 10(1), 58–76.
- Maulidya, A. Y. (2020). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19. 19, 5609–5619.
- Musdalifah, & R, L. O. A. A. (2022). *Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Pewisoa Jaya Kabupaten Kolaka*. 2(1), 1–18.
- Nurahmawati, F. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibadak. *Pkm-P*, 4(2), 166. <https://doi.org/10.32832/Pkm-P.V4i2.733>
- Saroh, Z. A., & Panjaitan, P. R. (2021). Desa Terdampak Covid-19: Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd). *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 110–113.

Shofwan Hendryawan*, Anisa Nur'aini, Dian Nursari, Irma Yulianti, Neng Novitri S.K, Sri Nurhayani, A. W. Y. (2021). Implementasi Program Blt Pada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan *Jrpa*, 6(2), 27–34. [Http://Jurnal.Ilmuanadministrasisebelasapril.Ac.Id/Index.Php/Jrpa/Article/View/78](http://Jurnal.Ilmuanadministrasisebelasapril.Ac.Id/Index.Php/Jrpa/Article/View/78)

Sulisman, A. N. (2020). *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Pada Masyarakat Desa Terdampak Covid-19 Di Desa Kresek*. 3(1).

LAMPIRAN



LURAH (H. SEMIONO) & BPKL (SARTONO)



KASIH PELAYANAN (DWI ANTARO)



KEPALA DUKUH (SEPI BUDI HARTANO)



MASYARAKAT : SUKIMAN



MASYARAKAT : SADRALI



MASYARAKAT : MARWOTO



MASYARAKAT : SRI PURWANINGSIH



MASYARAKAT : KASMIYATU



MASYARAKAT : SUPANDRI